

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata menjadi hal yang sangat penting. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dengan berkembangnya dalam pengelolaan sektor pariwisata memberikan dampak yang positif seperti menghasilkan atau meningkatkan PAD dan pendapatan perkapita suatu wilayah atau kota. Sektor pariwisata dapat di

andalkan karena sebagai salah satu pemasukan pendapatan asli daerah melalui retribusi dari dari pariwisata itu sendiri. Pemerintah selaku pejabat yang berwenang harus memberikan perhatian lebih pada objek wisata yang potesial atau yang berkembang dan akan maju , dan yang mestinya harus menghasilkan pendapatan yang mengarah ke sektor investasi guna untuk makin meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Kendal itu sendiri.

Kemudian pemasaran destinasi wisata sangat penting untuk di informasikan agar kegiatan kepariwisataan di kabupaten Kendal dapat di ketahui oleh wisatawan baik itu wisatawan dari dalam kabupaten Kendal sendiri ataupun dari luar kabupaten Kendal. Namun tidak hanya pendapatan bagi pemasukan pemerintah tapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar. (*RENSTRA 2010-2015 kabupaten kedal*)

Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa perbandingan pendapatan sektor pariwisata di Jawa Tengah.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun**  
**Anggaran 2011 - 2013 (Ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	2011	2012	2013
01. Kab. Cilacap	173,141,334	196,673,442	278,507,546
02. Kab. Banyumas	193,263,340	242,106,509	308,349,434
03. Kab. Purbalingga	94,937,162	112,727,590	122,858,739
04. Kab. Banjarnegara	71,107,053	94,271,468	98,975,320
05. Kab. Kebumen	73,339,838	102,344,166	131,481,737
06. Kab. Purworejo	88,941,782	98,262,003	125,756,041
07. Kab. Wonosobo	67,397,977	82,335,296	108,729,509
08. Kab. Magelang	90,462,631	123,722,781	173,253,652
09. Kab. Boyolali	96,489,134	127,725,207	160,752,450
10. Kab. Klaten	72,293,790	84,756,022	115,454,162
11. Kab. Sukoharjo	96,166,807	164,954,319	192,971,720
12. Kab. Wonogiri	77,141,691	100,037,192	111,592,606
13. Kab. Karanganyar	104,080,774	116,706,893	161,724,334
14. Kab. Sragen	94,518,999	127,695,844	146,721,550
15. Kab. Grobogan	87,912,458	105,463,321	143,598,616
16. Kab. Blora	67,021,770	81,987,007	95,186,717
17. Kab. Rembang	73,931,946	102,727,487	126,808,084
18. Kab. Pati	134,475,562	163,733,666	169,127,416
19. Kab. Kudus	102,621,949	113,622,250	144,995,092
20. Kab. Jepara	103,642,014	129,076,570	133,778,055
21. Kab. Demak	74,559,136	105,363,370	138,214,446
22. Kab. Semarang	129,771,004	156,192,739	215,684,519
23. Kab. Temanggung	63,328,489	76,637,673	102,080,197
24. Kab. Kendal	93,289,527	120,162,136	132,870,703
25. Kab. Batang	60,155,029	84,720,050	139,634,472
26. Kab. Pekalongan	82,105,270	114,793,366	148,550,938
27. Kab. Pemalang	79,677,543	97,951,208	136,362,282
28. Kab. Tegal	90,133,274	118,741,620	156,244,860
29. Kab. Brebes	78,275,852	101,806,858	135,055,402
30. Kota Magelang	63,557,702	90,986,302	107,739,839
31. Kota Surakarta	181,096,816	231,672,100	298,400,847
32. Kota Salatiga	60,611,340	63,171,463	106,100,450
33. Kota Semarang	522,925,031	786,563,412	925,919,311
34. Kota Pekalongan	63,344,978	91,205,786	114,252,439
35. Kota Tegal	117,244,291	156,663,028	176,377,335
<b>Jumlah/Total</b>	3,722,963,294	4,867,560,145	6,084,110,818

Sumber : Pemerintah Kabupaten/Kota

Source : *Government of Regency/City*

Untuk tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa melihat dari angka pendapatan daerah di provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal berada diperingkat 18 dari 35 Kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Ini menjadi perhatian khusus untuk Kabupaten Kendal dengan peringkat pendapatan di posisi 18. Sehingga dalam

pelaksanaan Retribusi Pariwisata yang baik dapat meningkatkan pendapatan dari bantuan kontribusi sektor Pariwisata, diharapkan Kabupaten Kendal mampu memunculkan persaingan suatu daerah yang perkembangannya baik dari sektor Pariwisata dalam kemajuan suatu daerah tertentu.

**Tabel 1.2**  
**Target pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Kendal 2012-2016**

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2012	1,000.000,000	837,424,520	83,74 %
2	2013	1,096,921,000	947,531,080	86,38 %
3	2014	1,100,000,000	1,027,777,740	93,40 %
4	2015	1,082,079.000	1,084,395,000	100,21 %
5	2016	1,350,000,000	1,227,750,000	90,94 %

Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Tabel 1.2 Dalam angka penerimaan tahun 2012-2016 sektor pariwisata, diimana pada tahun 2012,2013,2014 tidak melampaui target yang sudah ditentukan. Dengan angka yang tidak melampaui target yang diinginkan, maka ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata dalam sektor pariwisatanya. Untuk tahun 2015 realiasasinya dan persentase untuk pendapatan sektor pariwisata meningkat, akan tetapi pada tahun 2016 muncul permasalahan yang mengakibatkan angka pendapatan dari sektor pariwisata itu menurun yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yang ada di tiap-tiap destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah. Faktor eksternal adalah kondisi dan situasi yang mempengaruhi pengunjung wisata serta kawasan wisata dan faktor internalnya adalah situasi dan kondisi aparat pelaksanaannya serta

sistem pemungutannya sarana prasarana yang ada. Sedangkan peningkatan penerimaan pendapatan terjadi karena sudah adanya perbaikan dari tempat wisata, maka dari itu pemerintah kabupaten Kendal mengeluarkan peraturan daerah kabupaten Kendal nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha di Kabupaten Kendal dan termuat pada Bab VII tentang “retribusi tempat rekreasi dan olahraga”. Peraturan tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga kepada masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemkab Kendal mengusulkan kenaikan tarif masuk tiap destinasi wisata yang ada di kabupaten Kendal. Perubahan tarif diusulkan pada peraturan bupati nomor 61 tahun 2015 tentang “perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kabupaten Kendal”. Peraturan ini ditujukan untuk penunjang atau pendukung dalam kontribusi retribusi yang dilakukan oleh sektor pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Kendal. Disini dapat di lihat bahwa target dari dinas itu tidak kesusai dengan realisasi yang terjadi atau dilaksanakan kepada pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Terjadinya pendapatan yang tidak sesuai dengan target terjadinya karena faktor-faktor penghambat pada destinasi yang di kelola oleh pemerintah.

Terdapat beberapa destinasi yang dianggap menjadi sumber pendapatan asli daerah kabupaten Kendal :

1. DTW. Curugsewu
2. DTW. Sendang Sikucing

### 3. DTW. Kolam Renang Boja

Sumber : ( dokumen pendapatan asli daerah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Kendal )

**Tabel 1.3**  
**Target dan pendapatan 2013-2016 destinasi wisata Kabupaten Kendal**

Destinasi	Sedang sekucing				Curug sewu				Kolam renang boja			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
<b>Target</b>	189,000,000	192,079,000	192,079,000	241,600,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	807,000,000	167,921,000	167,921,000	150,000,000	256,400,000
<b>Realiasi</b>	149,438,000	144,815,000	225,190,000	278,898,000	513,767,000	595,474,000	670,626,000	812,239,000	143,735,000	151,950,000	226,542,000	336,677,000
<b>%</b>	79,07 %	75,39 %	177,24 %	115,44 %	79,04 %	91,61 %	103,17 %	100,65 %	85,60 %	90,49 %	151,03 %	131,31 %

Sumber : Spj pendapatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu Dinas Pariwisata mengelola beberapa destinasi yang di pantauan pengelolaan pemerintah yaitu 3 destinasi saja dari 9 destinasi pariwisata. Dalam penelitian ini hanya akan mengamati pada 3 destinasi pariwisata di yaitu : Sendang Sekucing, Curug Sewu, Kolam Renang Boja. Untuk melihat target pendapatan sektor pariwisata pada 3 destinasi pada tabel 1.2 di tahun 2013-2016

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya

yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) penyajian pendapatan regional untuk semua agregat pendapatan pada suatu daerah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan suatu daerah dalam menggunakan sektor-sektor produksi yang telah dimiliki daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai suatu daerah mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam pencapaian tingkat kemakmuran. Semakin tinggi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang telah dimiliki. (Jurnal Widya Karisma dalam “ Evaluasi Peran Industri Pariwisata terhadap pendapatan asli daerah)

Di Kabupaten Kendal sendiri terdapat Peraturan Bupati yang mengatur tentang perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan tempat . peraturan bupati Kendal nomor 61 tahun 2015 pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah

obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, dan tentunya pendapatan perkapita.

(RENSTRA 2010-2015 kabupaten Kendal)

**Tabel 1.4**  
**Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga**

no	Jenis usaha	Tarif
1.	<p>Pengunjung objek wisata dikenakan tarif A. besaran retribusi masuk ke objek wisata :</p> <p>1. Hari biasa</p> <p>2. Hari libur/besar ; dan</p> <p>3. Hari kusus</p> <p>B. tanda masuk ke kolam renang:</p> <p>1. hari biasa; dan</p> <p>2. hari libur/besar</p> <p>C. tiket permainan anak-anak</p> <p>1. jet coaster</p> <p>2. kereta mini</p> <p>3. bianglala</p> <p>4. komedi putar</p> <p>5, becak air</p> <p>D. permainan sejenis selain tersebut huruf c</p>	<p>Rp. 5.000,00/orang</p> <p>Rp 7.000,00/orang</p> <p>Rp 10.000,00/orang</p> <p>Rp 7.000,00/orang</p> <p>Rp 10.000,00/orang</p> <p>Rp 5.000,00/orang</p> <p>Rp 5.000,00/orang</p> <p>Rp 5.000,00/orang</p> <p>Rp 5.000,00/orang</p> <p>Rp 5.000,00/orang</p> <p>Rp 5.000,00/orang</p>
2	<p>Pengunjung yang menggunakan fasilitas khusus pemerintah daerah dikenakan tarif :</p> <p>A. Wisma pemerintah daerah</p> <p>1. Kamar utama</p> <p>2. Kamar standar ekonomi;</p>	<p>Rp 40.000,00/hari</p> <p>Rp 20.000,00/ hari</p>



	dan	Rp 200.000,00/ hari
	3. Satu wisma keseluruhan;	Rp 3.000,00/orang/hari
	B. Tempat perkemahan	
3	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan objek wisata dikenakan :	
	a. Sepeda motor	Rp 1.000,00
	b. Mobil; dan	Rp 2.000,00
	c. Bus atau truk	Rp 5.000,00
4	Bagi orang-orang yang bejualan atau mengadakan usaha di dalam objek wisata dikenakan :	
	a. Usaha di tempat terbuka	Rp 500,00/meter/hari
	b. Kios pemerintah daerah ; dan	Rp 1.000,00/meter/hari
	c. Kios swadaya	Rp 500,00/meter/hari

Sumber:(Peraturan bupati Kendal provinsi jawa tengah nomor 61 tahun 2015)

Sumber PAD yang didapat oleh dinas kepemudaan,olahraga dan pariwisata terdapat pada 3 titik destinasi yang ada di kabupaten Kendal yaitu di antaranya ada : “Sendang Sekucing, Curug Sewu, Kolam Renang Boja”. Dalam tabel 1.4 sudah di jelaskan bahwa perbuahan tarif yang di gunakan pemerintah daerah yaitu Dinas kepemudaan, Olahraga dan pariwisata untuk ketiga daya tarik wisata dalam kemajuan atau pelaksanaan kebijakan retribusi pariwisata di Kabupaten Kendal . beberapa rincian harga tiket masuk wisata dan beberapa objek yang ada di dalam wisata yaitu Sendang Sekucing, Curug Sewu, dan Kolam Renang Boja.

Untuk itu diharapkan dalam perubahan tarif yang sudah terinci dalam peraturan Bupati Kendal akan menimbulkan dampak baik bagi kemajuan daerah yaitu Kabupaten Kendal. Di lihat dari perkembangan

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pengunjung dan Pemasukan Obyek Wisata**  
**Di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2016**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
<b>a.</b>	<b>Sendang Sikucing</b>				
	Pengunjung ( orang )	21,785	43,114	54.572	39,837
	Mobil ( unit )	-	-	-	-
	Sepeda Motor ( unit )	-	-	-	-
	<b>Pendapatan dari pengunjung ( rupiah )</b>	<b>231,935,000</b>	<b>167,364,000</b>	<b>196.250.000</b>	<b>331,072,900</b>
	Pendapatan Kendaraan ( rupiah )	0	0	0	-
	Selisih	<b>64.571.000 (turun)</b>	<b>28.886.000 (naik)</b>	<b>134.822.900 (naik)</b>	-
<b>b.</b>	<b>Curugsewu</b>				
	Pengunjung ( orang )	78,346	94,204	92.555	83,131
	Mobil ( unit )	1,883	2,258	2.222	2,867
	Sepeda Motor ( unit )	14,054	12,153	12,225	14,455
	<b>Pendapatan dari pengunjung ( rupiah )</b>	<b>387,564,000</b>	<b>498,664,000</b>	<b>670.626.000</b>	<b>810,575,000</b>
	Pendapatan Kendaraan ( rupiah )	17,820,000	14,168,000	16,669,000	20,215,000
	Selisih	<b>111.100.000 (naik)</b>	<b>171.962.000 (naik)</b>	<b>139.949.000 (naik)</b>	-
<b>c.</b>	<b>Kolam Renang Boja</b>				
	Pengunjung ( orang )	21,785	27,540	35.893	36,753
	<b>Pendapatan dari pengunjung ( rupiah )</b>	<b>231,935,000</b>	<b>175,628,000</b>	<b>226.367.000</b>	<b>279,701,800</b>
	Selisih	<b>56.307.000 (turun)</b>	<b>50.739.000 (naik)</b>	<b>53.334.800 (naik)</b>	-
<b>d.</b>	<b>Total Jumlah Pengunjung</b>	121,916	164,858	183.02	159,721
<b>e.</b>	<b>Total Pendapatan dari Pengunjung dan Kendaraan</b>	869,254,000	858,325,000	1,093,243,000	1,421,349,700

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

Dari data tabel 1.5 menunjukkan bahwa rincian dana yang menjadi objek pengretribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dimana 3 destinasi wisata yang menjadi unggulan untuk pengretribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Dimana nanti akan di jadikan satu dana baik dari penarikan karsis masuk wisata, maupun karsis parkir pengunjung yang di jadikan satu untuk pengretribusi dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Kendal.

### **1.2 Identifikasi masalah**

1. Pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal yang mempunyai potensi yang tinggi tetapi banyak yang tidak di explor dan di manfaatkan dengan baik.
2. Retribusi pariwisata di Kabupaten Kendal belum dikelola dengan baik.
3. Penarikan retribusi pariwisata masih rendah dibandingkan dengan wilayah atau daerah yang lain

### **1.3 Rumusan masalah**

- a. Bagaimana perkembangan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kendal ?
- b. Apa saja yang menjadi kendala atau faktor penghambat retribusi pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ?

### **1.4 Tujuan**

Tujuan penelitian untuk menjelaskan tentang apa yang akan dicapai oleh penelitian atau hasil penelitian. Hal itu dilakukan dengan menyimpulkan sejumlah pengetahuan dan mengarah pada usaha untuk memahami dan menerangkan dari tujuan penelitian itu . adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perkembangan retribusi sektor pariwisata dalam mengelola tiga destinasi wisata yaitu : pantai Sendang Sekucing, Curug Sewu, Kolam Renang Boja.
2. Untuk mengetahui sektor pariwisata di Kabupaten Kendal dalam mengelola retribusi.

### **1.5 Kajian Teori**

#### Perkembangan Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik merupakan produk impor yang coba disisipkan dengan kearifan local, ilmu admiministasi publik ini berkembang pada era Woodrow Wilson, ketika Wilson melihat bagaimana manata suatu negara yang begitu besar dengan pola-pola yang menggunakan patronase , seharusnya pola yang di gunakan dalam pemerintahan menggunakan prinsip bisnis bisa bekerja secara efektif, efesien dan ekonomis.

#### Paradigma 1 : Paradigma dikotomi politik dan administrasi (1990-1926)

Paragdima ini untuk memisahkan antara politik dengan administrasi. Melihat bahwa perlu adanya pemisahan antara administrasi dan politik. Pemisahan ini merupakan alas an karena administrasi masih di penuhi dengan spoils dan sistem patronase antara dalam perekrutan para pegawai negri sipil. Politik di determinasikan sebagai tujuan dan kebijakan dalam pemerintahan dan administrasi bertugas untuk mencapai tujuan dan kebijakan dari politik tersebut. Sehingga tidak dapat mengaplikasikan administrasi yang netral karena kepentingan politik biasanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada

dikotomi ini memfokuskan kepada memposisikan pejabat administrasi yang sesuai dengan kehendak politik sehingga , para elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya.

#### Paradigma 2 : Paradigma prinsip – prinsip administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip administrasi ini terutama yang ditawarkan oleh willoughby's tentang prinsip-prinsip administrasi, menawarkan bahwa administrasi adalah suatu prinsip yang tidak dapat dicampur-campur dengan bentuk lain. Mereka memperkenalkan prinsip – prinsip administrasi sebagai focus administrasi publik. Prinsip – prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedangkan lokusnya dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip – prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Dengan demikian, dalam paradigma ini, fokus lebih ditekankan dari pada lokusnya.

#### Paradigma 3 : Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini dihiasi oleh berbagai pandangan politik , bahkan para pakar mncoba memperbaharui definisi lokus dari administrasi public yang disebut dengan governmental bureaucracy. Penulisan-penulisan ilmiah dalam administrasi public banyak termasuk dalam kajian-kajian ilmu politik, sehingga ilmu administrasi sendiri sebagai ilmu yang sudah berjalan pada paradigma ke dua lalu menjadi kritik tajam karena tidak bisa keperluan-keperluan publik.

Paradigma 4 : Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Paradigma ini ilmu administrasi publik mendapatkan bantuan kembali dari adik mudanya yaitu ilmu manajemen, ini karena diketepikannya ilmu administrasi publik pada priode yang lalu. Di temukanlah suatu konsep yang lama yang ditawarkan pada berbagai cendekia administrasipublik seperti konsep pengembangan organisasi/pembinaan organisasi (organization development), pengangkatan konsep manajemen ini sebagai salah satu paradoks dari kajian-kajian ilmu politik yang sangat empirikal , sehingga tidak dapat dicarikan benang merah konsepnya.

Paradigma 5 : Administrasi publik sebagai administrasi publik. (1970-an)

Paradigma yang di tulis Nicholas Hendry (1975) menekankan bahawa ilmu administrasi publik sebgaim ilmu administrasi publik dimana berbagai konsep masuk ke dalam ilmu ini. Diawali dengan bukanya beberapa departemen yang memiliki progam pasca dalam ilmu administrasi publik di amerika serikat.

Paradigma ini juga dikenal dengan nama *New Public Manajement* (NPM) DI Inggris. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma terdahulu yaitu adminstrasi klasik kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. Hood (Keban ,2014: 36) mengungkapkan bahwa ada tujuh komponen doktrin dalam NPM :

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor public
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol output

4. Pergeseran perhatian ke unit – unit yang lebih kecil
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya

Di tahun 2003 kemudian muncul lagi paradigma baru yang oleh J.V Denhardt dan R.B Denhard (2003) diberi nama New Public Service (NPS) kedua tokoh ini menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan Reinventing Government atau NPM, dan beralih ke prinsip New Public Service. Administrasi publik harus :

1. Melayani warga masyarakat bukan pelanggan
2. Mengutamakan kepentingan public
3. Lebih menghargai kewarganegaraan dari pada kewirausahaan
4. Berfikir strategis, dan bertindak demokratis
5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah
6. Melayani dari pada mengendalikan
7. Menghargai orang, bukan produktivitas semata

G. Shabbir Cheema ( dalam Keban.2014:37) mengungkapkan empat fase administrasi publik yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi yaitu :

1. Tradisional Public
2. Public Management

3. New Public Management

4. Governance

New Public Service (NPS)

Pada tahun 2003, atau kurang lebih sepuluh tahun kemudian muncul lagi paradigma baru dalam administrasi public yaitu “*The New Public Service*” oleh J.V Denhardt & R. B. Denhardt (2003). Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan *Reinventing Government* atau *New Public Management*, dan beralih ke prinsip *New Public Service* (Harbani Pasolong, 2011: 35). Denhardt dalam Pasolong 2011: 35 berjudul “*The New Public Service : Seving, not Stering*”. Pada halaman pendahuluan menyatakan NPS lebih diarahkan pada *democracy, pride and citizen* dari pada *market, competition and customers* seperti sector privat.

Semua paradigma di atas menunjukkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi perubahan orientasi administrasi publik yang sangat cepat. Kegagalan yang dihadapi oleh suatu Negara, telah disadari sebagai akibat dari ketidakberesan administrasi publik. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengaruh administrasi publik semakin tinggi. Dapat dikatakan bahwa paradigma NPM orientasinya kepada kepuasan pelanggan, sedangkan NPS orientasinya kepada kualitas pelayanan publik.

Menurut konsep ilmu administrasi Negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari Negara (organisasi), yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan.



### **1.5.1 Administrasi publik**

Litchfield dalam Syafiie(2006:25) Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Syafiie(2006:25) mendefinisikan Administrasi Publik adalah administrasi dari negara-negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Nicholas Henry dalam buku Teori Administrasi Publik (Pasolong, 2011: 19) menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain yaitu :

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
3. Kebijakan Publik yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

### **1.5.2 Kebijakan publik**

Dalam buku Analisis Kebijakan Publik (Subarsono, 2013: 2) Thomas Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan menurut J Anderson dalam Subarsono(2013: 2) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Menurut Anderson, konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi (Budi Winarno, 2012: 23-24), yakni :

- a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.
- c. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun

demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. (menurut A. Hoogerwerf,) (Riant Nugroho 2004 dalam buku kebijakan publik) Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Kebijakan publik memiliki proses, proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji.

Proses tahap-tahap kebijakan publik adalah :

a. Penyusunan Agenda

Masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tadi kemudian dicari pemecahan masalah terbaik

#### c . Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak pemecahan masalah yang ada,pada akhirnya salah satu dari alternative tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative,consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan

#### d. Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

Dalam proses pelaksanaan kajian perkembangan retribusi pariwisata memerlukan proses implementasi dalam tahapan-tahapan kebijakan yang sudah di bentuk. Dimana akan diliat beberapa variabel yang menunjukkan apakah kebijakan yang sudah di buat sudah terlaksana dengan baik. Penilaian variabel yang menjadi fokus dari pembahasan nanti yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Struktur Birokrasi, dan Disposisi.

#### e . Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Dalam proses pelaksanaan Kajian Perkembangan Retribusi Pariwisata memerlukan tahapan yang terakhir dimana sebagai penilaian apakah suatu kebijakan itu berhasil atau tidak. Dalam proses terakhir dari tahapan-tahap ini akan melihat beberapa point yang menjadi penilaian suatu kebijakan itu berhasil dengan baik, Melihat dari variabel Efektivitas dan Efesiensi.

### 1.5.3 Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

#### a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

#### b. Sumberdaya

Untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program,

adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Pada dasarnya tidak ada model implementasi kebijakan dinilai baik atau buruk. Hal ini dikarenakan setiap isu yang ada berdasarkan kebijakan yang telah dibuat harus disesuaikan dengan model implementasi yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada sehingga kebijakan tersebut memiliki dampak bagi target kebijakan itu sendiri. Hal terpenting dalam memilih model kebijakan itu adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut menimbulkan keefektifan bagi kebijakan itu sendiri.

Dalam studi penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh pariwisata dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa variabel yang ada di teori implementasi yaitu :

Komunikasi, Sumberdaya, Struktur birokrasi dan Disposisi. Dimana nanti akan dilihat kekurangan dalam pelaksanaan suatu kebijakan menggunakan variabel dari teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III .

#### **1.5.4 Evaluasi kebijakan**

“Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (Rating) dan penilaian (Assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”

Islamy (2000) mengatakan bahwa penelitian (evaluasi) kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Darinya kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan), dll.

- a) **Evaluasi Desain Kebijakan**, untuk menilai apakah alternative-alternatif yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan



mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (*cost-benefit analysis*), dll yang bersifat rasional dan terukur.

- b) **Evaluasi Legitimasi kebijakan**, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat (*pooling*), *survery*, dll.
- c) **Evaluasi Formatif** yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung Tujuan evaluasi formatif ini utamanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi Formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi.
- d) **Evaluasi Sumatif** yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasi dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi Sumatif ini adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas program tersebut member dampak yang nyata pada problem yang ditangani.

Untuk penelitian ini tentang Kajian Retrbusi Pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal itu masuk pada evaluasi sumatif karena penelitian ini menggunakan regulasi yang memberikan tujuan untuk mengukur bagaimana efektifitas progam dan efesiensi progam yang ada dalam peraturan atau

regulasi yang ada di kabupaten Kendal. Sehingga nanti akan terlihat dampak nyata pada masalah-masalah yang sedang di tangani saat ini.

#### **1.5.4.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi Kebijakan memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut (Subarsono, 2013: 120-121) :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.  
Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.  
Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan.  
Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan.  
Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.  
Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

#### **1.5.4.2 Tipe Evaluasi Kebijakan**

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe (Budi Winarno, 2012 : 230-233) :

- a. Tipe Pertama : Evaluasi Kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe Kedua : Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Tipe Ketiga : Evaluasi kebijakan sistematis.

Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik.

#### **1.5.4.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan**

Ada tiga fungsi evaluasi kebijakan (Agustino, 2012: 188-189) :

- a. Pertama, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :
  1. Seberapa jauh kebutuhan, bila dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
  2. Apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsive dan akuntable, dan adil.
  3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri.

- b. Kedua, evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target , pada dasarnya tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok/golongan/partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai.
- c. Ketiga, evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses evaluasi kebijakan dapat memberi sumbangan bagi reformulasi masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi kebijakan juga dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang baru dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik.

#### **1.5.4.4 Indikator Evaluasi Kebijakan**

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (Subarsono, 2013:126) mencakup lima indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Indikator Evaluasi Kebijakan**

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskannya?
6	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

*Sumber : Duun, William, (2012), Analisis Kebijakan Publik*

### **1.5.5 Retribusi**

Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas

pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

#### **1.5.6 Penelitian terdahulu**

Pertama yaitu skripsi penelitian Nur Indah Kurnia Sari Universitas Negeri Surabaya dengan judul Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik). Dalam penelitiannya peneliti merumuskan tujuannya yaitu untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi wisata Makam Sunan Giri terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan kontribusi retribusi pariwisata Makam Sunan Giri mulai tahun 2009-2013. Ada variabel yang digunakan adalah Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi jasa usaha, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya Metode Analisis yang digunakan yaitu Analisis kontribusi Retribusi Tempat Wisata. Sehingga hasil penelitiannya sebagai berikut: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah khususnya untuk penerimaan pendapatan wisata makam sunan giri cenderung berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena tidak tentunya jumlah pengunjung setiap tahun. Dan dengan adanya kenaikan tarif yang awalnya Rp 500,00 pada tahun 2009-2010 menjadi Rp 1.000,00 di tahun 2011-2013, hal ini juga menyebabkan kenaikan pendapatan retribusi makam sunan giri yang memberikan kontribusi 22,15% terhadap PAD Kabupaten Gresik. Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan kontribusi menjadi

18,71%, yang disebabkan proporsi jumlah PAD yang semakin besar dibandingkan tahun lalu padahal jumlah pengunjung dan pendapatan retribusi meningkat. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 20,89%, dikarenakan naiknya volume pengunjung dan peningkatan jumlah PAD hanya Rp 75.177.823.913,62.

Penelitian yang kedua yaitu Amin Sapto Saputro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Evaluasi Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam penelitiannya peneliti merumuskan tujuannya yaitu pengembangan obyek Pariwisata Baturaden yang menjadi masukan dari segi ekonomi dalam peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah Banyumas. Selanjutnya metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data yang bersifat induktif yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

Proses program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Banyumas. Proses secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi. Berbicara mengenai proses yang dilalui guna melaksanakan program pengembangan pariwisata. Proses secara keseluruhan mulai dari perencanaan awal telah berjalan sebagaimana mestinya,

yakni melalui musrenbang yang melibatkan para perencana dan tokoh masyarakat sampai kepada penyusunan program dan anggaran yang dibutuhkan.

Berdasarkan data sekunder, dalam pelaksanaan pengembangan Obyek wisata Baturraden terdapat beberapa kendala yang terjadi akibat dari kurangnya koordinasi antara pihak kontraktor, UPT lokawisata Baturraden dan juga Anggota kelompok kerja yang ada di sana. Hal ini dapat dilihat dari salah satu program pengembangan jenis obyek wisata yaitu pembuatan ruang tunggu yang ada di wahana kolam renang.

Rujukan penelitian yang ketiga jurnal Agus Ananto Widodo, Hesti Lestari Universitas Diponegoro dengan judul Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang. Dalam penelitiannya peneliti merumuskan tujuannya yaitu

1. Menganalisis pelaksanaan strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang.
3. Mengetahui cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya metode yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:



Dalam strategi yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan sektor pariwisata diantaranya :

- Meningkatkan kualitas destinasi (produk) pariwisata dengan menggunakan konsep pemasaran atau berorientasi pasar.
- Mengembangkan pemasaran pariwisata dengan mendasarkan pada analisis pasar secara kontinyu
- Meningkatkan citra Kabupaten Semarang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dengan menggunakan pendekatan berbasis kualitas layanan.

Rujukan penelitian yang ke empat Irene Tivani Universitas Hasanuddin dengan judul Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Dalam penelitiannya peneliti merumuskan tujuannya yaitu Untuk menjelaskan pelaksanaan program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja dan Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi, bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, factual dan akurat. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

Adapun program pengembangan yang telah di bentuk di tana toraja di sektor kepariwisataan

1. Pembukaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Pango-pango.
2. Pembukaan dan Penataan Objek Wisata Religi Buntu Burake.
3. Penataan Objek wisata Sarambu assing.
4. Penataan Taman Rekreasi Barereng
5. Penataan Objek Wisata Arum Jeram (Rafting).
6. Penataan Objek Wisata Perkampungan Sillanan.
7. Pembangunan Convention Hall, Panggung dan Pasar Seni.

Penelitian yang ke lima M. Saiful Dahlan yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Wisata Bahari pada daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat studi kasus pulau pisang. Dalam penelitiannya peneliti merumuskan tujuannya yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan wisata bahari pada daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015).
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Peran Serta Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Terkait Mengenai Pengembangan Wisata Bahari Pulau Pisang

Selanjutnya metode yang digunakan oleh peneliti yaitu tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya sebagai berikut:

Hasil penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Wisata Bahari Pada Daerah Tertinggal Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015), Maka hasil yang di dapat adalah

- Evaluasi Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Wisata Bahari Pada Daerah Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Pulau Pisang)

- Faktor Penghambat dan Peran Serta Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Terkait Mengenai Pengembangan Wisata Bahari Pulau Pisang

1. Strategi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Pisang. Proses evaluasi strategi dimulai dari apa yang harus diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan apabila terjadi tidak sesuai dengan harapan maka harus melakukan tindakan koreksi.

(1). Menentukan apa yang harus di ukur, (2). Melakukan pengukuran atas kinerja aktual, (3). Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang dibuat.

2. Peran serta pemerintah, masyarakat dan investor dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Pisang. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal yaitu: perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan penunjang pariwisata, tentang kebijakan pariwisata (policy), dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). peran masyarakat seharusnya dapat menggerakkan dan menjalankan proses pembangunan kegiatan pariwisata agar lebih produktif dan masyarakat juga harus

memiliki pemikiran sadar wisata. Sifat dari investor ialah membantu pembangunan dan pengembangan wisata bahari Pulau Pisang. Investor diharapkan dapat memberikan suntikan dana agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal.

3. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata di Pulau Pisang ialah minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang (transportasi air maupun darat, dermaga, akses jalan, listrik, kesehatan, toilet umum, tempat sampah, papan informasi dan peraturan, penginapan, dll), terbatasnya dana untuk pembangunan pariwisata di Pulau Pisang dan perlunya promosi agar dapat memperkenalkan potensi yang dimiliki Pulau Pisang baik kepada wisatawan dalam dan luar negeri.

**Tabel 1.7**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Penulis, Judul, Nama Jurnal</b>	<b>Tujuan</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN PENELITIAN INI DENGAN PENELITIAN SAYA</b>
<b>1</b>	Nur Indah Kurnia Sari <i>Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik).</i>  penelitian universitas Surabaya tahun 2015	untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi wisata Makam Sunan Giri terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan kontribusi retribusi pariwisata Makam Sunan Giri mulai tahun 2009-2013	Analisis kontribusi Retribusi Tempat Wisata	Menjelaskan tentang kontribusi yang dilakukan oleh berbagai macam wisata di bidang pariwisata.	Fokus yang berbeda, lokus yang di teliti berbeda dan teori yang di gunakan berbeda
<b>2</b>	Amin sapto saputro <i>evaluasi pengembangan obyek wisata di kabupaten banyumas dalam</i>	untuk mengetahui pengembangan obyek pariwisata baturaden yang menjadi masukan dari segi ekonomi dalam peningkatan	pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi	Menjelaskan progam-progam yang di bentuk dinas pariwisata dalam pengembangan	Lokus yang diteliti berbeda, Fokus yang diteliti berbeda dan

	<p><i>meningkatkan pendapatan asli daerah.</i></p> <p>penelitian universitas muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014</p>	pendapatan asli daerah di wilayah banyumas	kasus	pariwisata yang meningkatkan pendapatan asli daerah di banyumas.	
3	<p>Agus Ananto Widodo, Hesti Lestari</p> <p><i>strategi pengembangan pariwisata di kabupaten semarang.</i></p> <p>Jurnal agus ananto widodo dan hesti lestari universitas diponegoro Fisip, administrasi publik</p>	Mengetahui strategi perkembangan pariwisata di kab. Semarang, apasaja faktor pendorong dan penghambat perkembangan pariwisata kabupaten semarang, dan apa saja yang dapat dilakukan dalam penghambatan perkembangan pariwisata kabupaten semarang	metode yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Menjelaskan tentang perkembangan pariwisata dan apa saja strategi yang dilakukan oleh dinas pariwisata dalam perkembangan pariwisata.	Teori yang digunakan berbeda, Fokus dan lokus penelitian berbeda
4	<p>Irene tivani</p> <p><i>EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN TANA TORAJA</i></p> <p>Penelitian universitas hasanuddin tahun 2015</p>	Mengetahui Untuk menjelaskan pelaksanaan program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja dan Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja	pendekatan kualitatif	Menjelaskan tentang program yang dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten tana toraja dalam perkembangan pariwisata yang ada di kabupaten tana toraja	Teori yang digunakan berbeda, ,lokus penelitian berbeda
5	<p><i>M. Syaiful Dahlan</i></p> <p><i>EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN PESISIR BARAT</i></p> <p><i>penelitian fisip universitas lampung tahun 2015</i></p>	Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan wisata bahari pada daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Pulau Pisang Tahun 2015)	pendekatan kualitatif dengan studi kasus	Penelitian ini Menjelaskan Tentang strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan wisata bahari pada daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat	Teori yang digunakan berbeda, Fokus dan lokus penelitian berbeda

## **1.5 Fenomena penelitian**

### **1.6.1 Perekembangan retribusi sektor pariwisata**

Dengan indikasi atau sub fenomena

- a. Perekembangan retribusi Sektor pariwisata di destinasi pantai Sendang Sekucing, Indikasi yang di teliti :
  - Efektifitas, Perekembangan retribusi di wisata Sendang Sekucing.
  - Efisiensi, dalam pengeluaran sebanding dengan pendapatan di wisata Sendang Sekucing
- b. Perekembangan Retribusi Sektor Pariwisata di destinasi Curug Sewu, indikasi yang di teliti:
  - Efektivitas, perkembangan retribusi pariwisata dalam pembenahan untuk destinasi baru khususnya wisata alam
  - Efisiensi, dalam pengeluaran sebanding dengan pendapatan di wisata Curug Sewu
- c. Perekembangan Sektor Pariwisata di destinasi Kolam Renang Boja
  - Efektivitas. Perekembangan retribusi dalam destinasi yang dibuat untuk menarik simpati para pengunjung
  - Efisiensi, dalam pengeluaran sebanding dengan pendapatan di wisata Kolam Renang Boja

### **1.6.2 Faktor-faktor atau kendala yang ada di sektor pariwisata**

#### a.) Sumberdaya

Komponen yang menjadi salah satu keberhasilan kebijakan retribusi parkir. Komponen meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi

yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pariwisata di Kabupaten Kendal.. Sumber daya pelaksana di destinasi wisata itu kurang.

- Kuantitas , yaitu jumlah sdm terbilang kurang, karena dari ke tiga destinasi wisata yang di kelola oleh dinas pariwisata Sendang Sekucing, Curug sewu dan kolam renang Boja masih kurang.
- Kualitas , beberapa sdm yang mengelola usaha atau aset daerah berupa wisata itu dibidang juga kurang, karena dalam konteksnya beberapa wisata di Kabupaten Kendal tidak di pegang sesuai dengan skill kemampuan kepahaman tetang pariwisata , karena pemerintah atau dinas pariwisata cenderung memperkerjakan masyarakat biasa atau masyarakat sekitar untuk membantu mengelola pariwisata di Kabupaten Kendal.

#### b.) Komunikasi

Kajian Perkembangan Retribusi pariwisata di Kabupaten Kendal akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Komunikasi disampaikan secara top down dan dilakukan secara jelas dan konsisten.

#### c.) Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam

menjalankan kebijakan retribusi pariwisata. Struktur birokrasi tugas pokok dan fungsi pelaksana yang masih kurang jelas dan kurang rinci masih ada dari pelaksana yang melaksanakan tidak membayar pada masuk ke wisata yang ada di Kabupaten Kendal yang telah di arahkan oleh dinas pariwisata.

d.) Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif



bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

**Tabel 1.8**  
**Kategori Evaluasi**

Tipe kategori	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Cost-benefit Ratio; Manfaat bersih; Unit Biaya
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah	Biaya tetap, Efektifitas tetap
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Criteria Pareto; Kriteria Kaldor-Hicks; Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program public harus merata dan efisien

Sumber : Dunn, William, (2012), Analisis Kebijakan Publik

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang Kajian Perkembangan Retribusi pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut gejala yang diamati berdasarkan indikator penelitian yang digunakan :

1. Proses penarikan Retribusi Tempat Rekreasi Kabupaten Kendal

a. Efektivitas

Pengembangan sarana dan prasarana tempat rekreasi di Kabupaten Kendal.

b. Efisiensi

Pengeluaran sebanding dengan pendapatan yang di terima dengan pendapatan di wisata yang dikelola oleh Kabupaten Kendal.

c. Kecukupan

Jumlah sumber daya manusia dengan jumlah tempat rekreasi di Kabupaten Kendal dan tarif yang diberlakukan cukup di semua kalangan

d. Pemerataan

Adanya kondisi tempat yang strategis dan kondusif bagi masyarakat untuk berwisata (fasilitas jalan, listrik, air dan perlengkapan lainnya)

e. Responsivitas

1. Manfaat Retribusi Tempat Rekreasi bagi pemerintah dan masyarakat

2. Tanggapan pemerintah dan masyarakat mengenai Kebijakan Retribusi pariwisata di Kabupaten Kendal

### 3. Pencapaian tujuan Kebijakan Retribusi pariwisata dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kendal.

Untuk melihat seberapa besar capaian tujuan kebijakan Retribusi pariwisata dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kendal. digunakan tipe kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yang terakhir ,yaitu ketepatan dengan fenomena digunakan sebagai cara meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat

Adapun tujuan dari retribusi yaitu tujuan utamanya adalah untuk mengisi kas Negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya sedangkan tujuan tambahannya adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Adanya retribusi tempat rekreasi nantinya akan mempunyai outcome atau hasilnya berupa pengembangan tempat rekreasi atau wisata tersebut.

#### **1.7 Metode penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara yang ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal (rasional), cara-cara tersebut kemudian dapat diamati oleh indera manusia (empiris), dan proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Sehingga data yang di peroleh merupakan data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang (Moleong, 2007:5).

Studi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk selalu mencari sebab-akibat, namun lebih berusaha memahami situasi tertentu mencoba dan memperdalam gejalanya dengan mengintervensikan masalah atau menyimpulkan dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh kondisinya yang ada sekarang ini.

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan tersebut di atas, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan demikian data yang terkumpul akan diolah menjadi berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan apabila terdapat angka-angka, itu sifatnya hanya sebagai pendukung atau penunjang data dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek atau subyek pengamatan.

Pada dasarnya pada dasarnya metode penelitian adalah untuk membantu seorang peneliti dalam memberikan suatu penafsiran terhadap suatu permasalahan agar penulisan mengarah pada permasalahan yang tidak menyimpang dari tujuan semula. Tipe penelitian ada tiga macam, yaitu :

1. Penelitian Eksploratif, yaitu berusaha untuk menggali atau menjajaki ada tidaknya atau ingin mengetahui secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan.
2. Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu. Dalam penelitian ini belum ada hipotesis, tetapi sudah ada analisa namun belum begitu mendalam.
3. Penelitian Eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya hubungan dan pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya, untuk menguji hipotesis yang diajukan (diterima atau ditolak). Jadi, dalam penelitian ini sudah ada hipotesisnya.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat atau lokus penelitian dilaksanakan. Pada penelitian ini, penulis memilih lokus retribusi pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten kendal , provinsi jawa tengah. Sedangkan yang menjadi lokus atau wilayah dari penelitian ini adalah 3 tempat wisata yaitu :

1. Pantai Sendang Sekucing

The Sea Pantai Sendang Sekucing adalah Sebuah Obyek Wisata yang terletak di Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, yang berada dibawah naungan PT. Wersut Seguni Indonesia (WSI). Banyak permainan tersedia disana, Dari mulai permainan anak, rekreasi pantai, pentas lumba-lumba, kolam berenang bersama lumba-

lumba, Mini Zoo, kolam bermain untuk segala usia dengan geyuran air waterboom dan seluncuran yang menebar keceriaan.

## 2. Curug Sewu

Curug Sewu terletak di Patean, Kendal dan merupakan air terjun tingkat tiga dengan ketinggian sekitar 80m. Nama air terjun tersebut diambilkan dari nama desa tempat air terjun tersebut berada, yakni Desa Curug Sewu tepatnya di Kecamatan Patean, jaraknya 40 kilometer dari kota Kendal dengan terlebih dahulu melewati kota Weleri dan Sukorejo. dari temanggung dan wonosobo dapat melewati parakan - ngadirejo - Patean - Curug sewu. Air terjun Curugsewu memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri dibandingkan air terjun lainnya, dengan total ketinggian 70 meter yang terdiri dari 3 terjunan, masing-masing memiliki ketinggian 45 meter, 15 meter dan 20 meter. terlihat sangat indah dan menawan untuk dipandang, terlebih pada saat tertentu, dari antara terjunan muncul pelangi paduan aneka ragam warna yang mempesona.

## 3. Kolam Renang Boja

Kolam renang Boja terletak disisi timur jalan raya jurusan Kaliwungu - Boja di Kecamatan Boja, 300 m sebelum memasuki pertigaan jalan raya Boja. Fasilitas rekreasi olah raga ini memiliki 2 kolam renang, yakni untuk dewasa dan anak-anak. Disamping untuk berenang dan berekreasi, kolam renang ini juga sering digunakan kegiatan lomba dan pertandingan.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan oleh peneliti untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti, atau dengan kata lain disebut informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Suharsimi, 2010: 188). Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3. Koordinator pengelola tiap destinasi wisata Kabupaten Kendal  
(Sendang Sekucing, Curug Sewu, Kolam Renang Boja)

### **1.7.4 Teknik Pemilihan Informan**

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh Sugiyono (2012:52) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sementara, hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditransfer atau diterapkan ke situasi sosial (tempat lain) apabila situasi sosial yang diteliti.

Cara yang bisa ditempuh untuk menemukan informan dalam penelitian ini penulis memiliki dua langkah yaitu :

1. Melalui keterangan orang yang berwenang

Cara pertama ini bisa dilakukan dengan formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat dan lain sebagainya)

2. Melalui wawancara pendahuluan

Informan dalam penelitian kedudukannya sangat penting bagi peneliti. Adapun persyaratan tertentu yang harus mereka miliki untuk layak ditetapkan sebagai informan peneliti. Moleong 2006 (dalam Andi Prastowo 2012:196) menyebutkan bahwa ada 5 persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang agar layak dijadikan informan yaitu :

- a. Orang tersebut harus jujur dan bisa dipercaya
- b. Orang tersebut memiliki kepatuhan pada peraturan
- c. Orangnyanya suka bicara, bukan orang yang sukar bicara apalagi pendiam
- d. Orang tersebut bukan termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian
- e. Orang yang memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi

Dalam wawancara ini, peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang telah dijelaskan dan mampu menjawab atau memiliki kriteria-kriteria yang sudah ada.

### **1.7.5 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat bukan numerik atau bukan angka-angka melainkan kata-kata atau kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan. sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.



Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

### **1.7.2 Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data- data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari majalah, dokumen, laporan dan sumber- sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini berupa:

1. LKPJ dinas kebudayaan dan pariwisata 2015
2. RENJA dinas kebudayaan dan pariwisata tahun 2015
3. RENSTRA 2010-2015
4. RIPP tahun 2008
5. Peraturan bupati Kendal provinsi jawa tengah nomor 61 tahun 2015

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dalam hal ini adalah melakukan pengamatan secara langsung berkaitan dengan lokasi penelitian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Selain mengacu pada pedoman wawancara, peneliti juga mengembangkan pertanyaan secara spontan, sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal.

### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:247), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang

berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan karena data yang didapat dari lapangan akan sangat banyak jumlahnya.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti grafik, tabel, diagram dan sejenisnya. Dengan cara seperti ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

### **1.7.8 Kualitas Data**

Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-*recheck*

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori (Moleong, 2007: 332). Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Macam-macam triangulasi menurut Norman K. Denkin

1. Triangulasi metode
2. Triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok)
3. Triangulasi sumber data
4. Triangulasi teori

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data, karena Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.